



**MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA**

KOMISI C DPRD KOTA YOGYAKARTA

Sepanjang Prosedural, Dukung Penuh Kemandirian Kelola Sampah



Ketua Komisi C (kiri) bersama jajaran mendengarkan pen- Jajaran anggota Komisi C mencermati usulan kegiatan mi- DLH sebagai salah satu mitra kerja Komisi C menyampaikan paparan.

YOGYA (KR) - Memasuki akhir tahun ini persoalan sampah masih menjadi salah satu pokok pembahasan di jajaran legislatif. Salah satunya Komisi C DPRD Kota Yogyakarta yang siap memberikan dukungan penuh dalam kemandirian pengelolaan sampah di Kota Yogya. Dengan catatan, usulan yang disampaikan sesuai prosedur atau tata kala dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi C sebagai salah satu alat kelengkapan dewan memiliki ketugasan pengawasan dan pendampingan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya sebagai mitra kerja. Ketugasan DLH Kota Yogya yang mengurus persampahan pun tak luput dari pengawasan serta pendampingan. "Hari ini (kemarin) bersamaan dengan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2024 kami mengundang beberapa mitra kerja komisi. Salah satunya ialah DLH Kota Yogya untuk mencermati program di tahun depan. Terutama kebutuhan yang direncanakan untuk pengelolaan sampah," urai Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari, di sela memimpin rapat yang digelar di gedung dewan, Kamis (9/11).

Menurutnya sejak pertengahan tahun ketika terjadi darurat sampah akibat penutupan TPA Piyungan, masyarakat di Kota Yogya langsung terkena imbasnya. Apalagi saat itu penggepokan tidak sudah overload oleh sampah. Gerakan pengelolaan sampah yang sudah dirintis sejak awal tahun pun belum mampu menjadi solusi.

Bagitu pula ketika dilakukan pembukaan depo se- cara terbatas, antrean masyarakat yang hendak membuang sampahnya secara tertib tidak terhindarkan. Belum lagi pembuangan sampah liar yang turut menjadi persoalan baru, baik yang dibuang di sungai, pinggir jalan hingga pekarangan kosong. Persoalan itu akan selalu berulang ketika belum ada kemampuan untuk mandiri sampah atau ketertarikan terhadap TPA Piyungan masih tinggi.

Oleh karena itu Komisi C DPRD Kota Yogyakarta baik melalui perubahan anggaran tahun ini maupun rencana anggaran tahun depan, selalu memberikan dukungan besar terhadap pengelolaan sampah. Hampir semua usulan anggaran yang disampaikan oleh tim eksekutif tidak pernah tertunda untuk disetujui sepanjang memiliki output yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari perbaruan armada, pengadaan alat pengolah sampah, perbaikan TPS 3R Nitikan dan TPST Karangmuri hingga pembangunan TPS 3R baru. "Kami pantau terus kendala apa yang dihadapi oleh DLH Kota Yogya. Kemudian kebutuhan untuk mendukung program pengolahan sampah juga pasti kami setujui. Istilahnya, kalau untuk penanganan sampah kami semua memberikan keleluasan. Tetapi harus sesuai prosedur, tata kala dan mengedepankan unsur kehati-hatian," imbuh Ririk.

Selain itu dirinya juga berharap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah seharusnya selalu dikomunikasikan dengan Komisi C. Hal ini agar proses pengawasan dan pendampingannya dapat dilakukan secara optimal. Seperti rencana Pemkot Yogya yang hendak melibatkan ka- langan swasta dalam pengolahan sampah. Sejak awal rencana itu belum pernah dikordinasikan namun pihaknya justru mendapat informasi dari pemberitaan media jika sudah dilakukan MoU dengan perusahaan swasta.

Skema kerja sama dengan pihak swasta seharusnya dibahas secara mendalam. Hal ini agar jangan sampai hanya menguntungkan salah satu pihak saja. "Kerja sama itu kan harusnya menguntungkan kedua belah pihak. Makanya seharusnya skemanya dimatangkan dulu baru ada MoU. Ketika tiba-tiba sudah ada MoU kemudian business to business (B2B) baru dibahas kemudian, nanti titik temunya bagaimana," tanyanya.

Sebagai perbandingan, biaya yang disetorkan Pemkot Yogya ke Penda DIY untuk menaruh sampah di TPA Piyungan mencapai Rp 25.000 per ton. Kemudian pada tahun depan retribusi tersebut naik tiga kali lipat menjadi Rp 75.000 per ton. Dari aspek politik anggaran, kebutuhan biaya pada tahun depan tidak sedikit. Sehingga jika ada pelibatan swasta, perlu ada kejelasan sejak awal terhadap pembiayaan. Apalagi tarif yang dipatok oleh swasta biasanya lebih tinggi dibanding pemerintah. Benar saja, dalam rencana yang diusulkan, anggaran untuk pihak swasta tersebut dipatok Rp 400.000 per ton atau Rp 12 miliar untuk 300 hari kegiatan.

Sorotan juga disampaikan Sekretaris Komist C DPRD Kota Yogyakarta Affan Baskara Patria. Menurutnya dasar tarif Rp 400.000 per ton untuk pihak swasta seharusnya dibahas sejak awal. Hal ini supaya fungsi pengawasan bisa berjalan optimal. Jika ternyata itu nantinya membebani APBD

hingga harus merelokasi kegiatan lain maka perlu ada pertanggungjawaban. "Kami berharap fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik. Seharusnya kan sejak awal dibahas bersama. Kenapa perusahaan itu yang dipilih, seperti apa kinerjanya, bagaimana teknologi dan cara kerjanya, hasil pengolahannya seperti apa. Kemudian jika nanti tidak sesuai harapan, lantas kontraprestasinya seperti apa. Jangan kehati-hatian tiba-tiba dimunculkan. Langkah kehati-hatian ini yang perlu dikedepankan," paparnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Sigit Wicaksono, juga menyoroti perihal rencana B2B pengolahan sampah. Menurutnya, urusan sampah merupakan pelayanan bukan menggerak sektor keuangan. Pelibatan pihak swasta atau perusahaan cenderung lebih mengedepankan keuntungan. "Pengolahan sampah itu kan sebetulnya hanya berkaitan dengan teknologi. Saya yakin pemerintah sebetulnya mampu untuk mengadakan teknologi. Perkara biayanya besar, itu kan juga akan dipakai seterusnya, karena sampah ini selalu ada terus. Ya memang pemerintah tergantung dengan swasta," urainya.

Oleh karena itu Sigit mengusulkan supaya dibentuk perusahaan atau BLUD yang khusus menangani pengolahan sampah. Hal ini agar fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat benar-benar dibuktikan. Pasalnya jika anggaran membengkak untuk pembiayaan ke perusahaan, masyarakat juga yang pada akhirnya harus menanggung. Mulai dari berkurangnya program kegiatan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat maupun besaran pajak atau retribusi yang bakal dinaikkan. (Dhi-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005